

# KAJIAN AKUNTANSI

- Pengaruh Pengetahuan Informasi Penggelapan Pajak, Prinsip Moral, dan Penghasilan pada Kecenderungan Penghindaran Pajak: Sebuah Eksperimen  
Ponty Sya'banto Putra Utama
- Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia  
Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana
- Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Publik Terhadap Kebijakan Utang (Studi Pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)  
Muhammad Arfan dan Tania Febrina
- Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderasi  
Meri Susanti dan Eko Budi Santoso
- Analisis Variabel Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Perataan Laba  
Yana Agustriana dan Hiras Pasaribu
- Pengaruh Laba Akuntansi, Laba Tunai dan Arus Kas Bebas Terhadap Dividen Kas  
Fitria Warastuti, Kusharyanti dan Kunti Sunaryo

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta

Kajian Akuntansi	Volume 6	Nomer 2	Halaman 79-162	Yogyakarta Desember 2011	ISSN 1907-1442
------------------	----------	---------	----------------	--------------------------	----------------



Alamat Redaksi :  
Kajian Akuntansi  
Jalan SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur,  
Sleman Yogyakarta 55283  
Telp/Fax. 0274-487273, Hp. 081229459998  
E-mail : kajian\_akfe@upnyk.ac.id



# KAJIAN AKUNTANSI

## Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua Jurusan Akuntansi  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

**Ketua Editor**  
Hiras Pasaribu

**Dewan Editor**  
Alp. Yuwidianoro  
Ichan Setiyo Budi  
Lita Yulita  
Rusherlistyani  
Indra Kusumawardhani

## Mitra Bestari

Januar Eko Prasetyo	Ilya Avianti
UPN "Veteran" Yogyakarta	Universitas Padjadjaran
Soekrisno Agoes	John Hutagaol
Universitas Tarumanegara	Tex Centre Universitas Padjadjaran
Wiwiek Utami	Kumalahadi
Universitas Mercubuana	Universitas Islam Indonesia
Wawan Sukmana	Noto Pamungkas
Universitas Siliwangi	UPN "Veteran" Yogyakarta
Eko Hariyanto	Helmi Yazid
Universitas Jenderal Soedirman	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Muhammad Arfan	Tatang Ary Gumanti,
Universitas Syah Kuala	Universitas Jember
Jajang Badrujaman	Ichan Setyo Budi
Universitas Siliwangi	UPN "Veteran" Yogyakarta

**Tata Usaha**  
Antaris Setiawan  
Eko Harsono  
Mintarum

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Subag Administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi,  
Gedung KH. Samanhudi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jalan SWK 104  
(Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55283, Phon 0275-487273, Fax 0274-486255,  
E-mail: kajian\_akfe@upnyk.ac.id dan pasanbuhiras@yahoo.com

Kajian Akuntansi diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.  
Berisi Artikel hasil penelitian dan telaah analitis-kritis di bidang ilmu akuntansi, sebagai media informasi bagi para akademisi, praktisi dan pemerhati ilmu. Naskah yang dikirim ke Jurnal Kajian Akuntansi akan ditelaah oleh Mitra Bestari yang relevan setelah ditelaah oleh Dewan Editor.

Redaksi menerima artikel yang belum pernah diterbitkan di media lain, Naskah diketik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format seperti tercantum pada "Pedoman Penulis Artikel" di bagian belakang jurnal ini.

# KAJIAN AKUNTANSI

Volume 6, Nomor 2, Desember 2011

ISSN 1907 – 1442

## DAFTAR ISI

Pengaruh Pengetahuan Informasi Penggelapan Pajak, Prinsip Moral, dan Penghasilan pada Kecenderungan Penghindaran Pajak: Sebuah Eksperimen <b>Ponty Sya'banto Putra Utama</b> .....	<b>79-97</b>
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia <b>Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana</b> .....	<b>98-108</b>
Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Publik Terhadap Kebijakan Utang (Studi Pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009) <b>Muhammad Arfan dan Tania Febrina</b> .....	<b>109-123</b>
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Moderasi <b>Meri Susanti dan Eko Budi Santoso</b> .....	<b>124-133</b>
Analisis Variabel Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Perataan Laba <b>Yana Agustriana dan Hiras Pasaribu</b> .....	<b>134-148</b>
Pengaruh Laba Akuntansi, Laba Tunai dan Arus Kas Bebas Terhadap Dividen Kas <b>Fitria Warastuti, Kusharyanti dan Kunti Sunaryo</b> .....	<b>149-162</b>

## EDITORIAL

Dewan pembaca yang terhormat,

Redaksi Kajian Akuntansi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah mengirimkan artikel berupa hasil riset dan kajian teoritis atau pemikiran, sehingga jurnal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Tidaklah berlebihan apabila dalam penerbitan edisi kali ini redaksi memberikan sajian informasi yang cukup menarik yang lain dari edisi-edisi sebelumnya. Kajian Akuntansi Volume 6 Nomor 2 periode Juli-Desember 2011 mencoba menyajikan beberapa artikel hasil kajian teoritis atau pemikiran dan hasil penelitian untuk para pembaca.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi artikelnya dalam edisi ini. Demikian juga kepada para Dewan Editor dan Mitra Bestari yang masih bersedia memberikan waktu, tenaga dan pemikiran untuk menelaah artikel yang masuk ke meja redaksi. Tentu saja segala saran, masukan dan revisi yang telah diberikan oleh para penyunting memberikan nilai tersendiri demi untuk meningkatkan penyajian artikel yang berkualitas dan berkelanjutan penerbitan jurnal Kajian Akuntansi di masa yang akan datang.

Akhirnya, redaksi tidak lupa selalu memohon maaf kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan jurnal ini. Segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas Kajian Akuntansi pada masa yang akan datang. Semoga upaya dan niat tulus kami yang sedalam-dalamnya dapat memberikan hasil yang kita harapkan bersama. Apabila terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyajian edisi ini, redaksi sekali lagi memohon maaf.

Yogyakarta,    Desember 2011  
Redaksi

# PENGARUH PENGETAHUAN INFORMASI PENGGELAPAN PAJAK, PRINSIP MORAL, DAN PENGHASILAN PADA KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK: SEBUAH EKSPERIMEN<sup>1</sup>

Ponty Sya'banto Putra Utama

STIE Solusi Bisnis Indonesia (STIE SBI) Yogyakarta, E-mail:

ponty.sph@gmail.com, pon\_ty@yahoo.com;

Jl. Ring road Utara No. 17 Condongcatur, Depok Sleman Yogyakarta 55283

## ABSTRACT

*The objective of this study is expected to answer questions such as why the taxpayer comply tax rules. This research has the motivation to answer the question of why taxpayers comply tax rules because at this time, research on taxpayer behavior mostly focus on why taxpayers choose not to comply tax rules. Therefore, this study tested the unexpected factors influencing propensity to evade tax, namely tax evasion information, moral principles, and taxpayer income. This study used an experimental design 2x3 (Three Way ANOVA). This research results shows that tax payer knowledge about information of tax evasion can reduce the propensity to evade taxes, both on high-income taxpayers or low-income taxpayers. The study was also successful in proving that the taxpayers with high moral principles have a low propensity to evade taxes, both on high-income taxpayers or low-income taxpayers. The results add new insight into tax compliance research by focusing on the actual tax avoider rather than the act of tax avoidance.*

**Keywords:** *propensity to evade taxes, moral principles, tax avoidance, tax evasion, taxpayer income.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi suatu negara. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi negara maka merupakan hal yang sulit untuk dibayangkan apabila hukum pajak di suatu negara tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh terhadap perilaku manusia tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam sistem perpajakan yang menganut sistem *self assessment*, yang menjadi karakteristik hukum pajak penghasilan di Indonesia. Oleh sebab itu, perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak merupakan isu yang relevan di

tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Menurut Heru (1997), definisi penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2000) tentang Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia, dikemukakan bahwa ada konsensus dalam literatur keuangan publik bahwa di negara-negara

<sup>1</sup> Dibiayai melalui DIPA Kopertis Wilayah V Nomor: 0600/023-04.01/14/2011 Tahun Anggaran 2011

<sup>2</sup> Alamat korespondensi: Jurusan Akuntansi STIE SBI Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara no. 17 Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283, e-mail: ponty.sph@gmail.com

berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara.

Sistem pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, sehingga keadilan menjadi isu yang relevan untuk meminimalkan penggelapan atau penghindaran pajak. Supaya sistem *self assessment* bekerja, wajib pajak haruslah merasakan sistem pajak tersebut adil. Keadilan merupakan motivator bagi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak (Spicer & Becker, 1980). Selain itu, menurut Rasinski (1987) dan Eriksen & Fallan (1996) (dalam Varosi, *et al.*, 2000), keadilan merupakan penentu kepuasan wajib pajak dengan proses politik.

Dengan adanya perlakuan yang seimbang, atau persepsi dari perlakuan yang seimbang, bagi semua wajib pajak yang tidak mungkin terjadi, kantor pajak perlu melakukan cara lain untuk meminimalkan penghindaran pajak. Walaupun teori keadilan memprediksi bahwa persepsi ketidakadilan wajib pajak adalah motivasi bagi wajib pajak untuk melalaikan pajak, teori perbandingan sosial berfungsi sebagai penyeimbang (*counter balance*). Ketika dihadapkan dengan ketidakadilan yang tampak di depan mata, wajib pajak bisa saja tidak memilih melalaikan pajak jika mereka memandang pihak lain secara sosial atau moral tidak bertanggung jawab (Varosi, *et al.*, 2000).

Penelitian-penelitian tentang perilaku wajib pajak di Indonesia fokus pembahasannya masih banyak pada persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan undang-undang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Priono (2002) menunjukkan bahwa proses belajar, motivasi, dan kepribadian tidak berpengaruh positif terhadap pembentukan persepsi. Hasil lainnya menunjukkan bahwa perbedaan pengaruh variabel proses belajar, motivasi, dan kepribadian terhadap persepsi antara wajib pajak badan perusahaan kecil

dan menengah menunjukkan perbedaan signifikan. Sedangkan untuk pengaruh persepsi terhadap pelaksanaan sistem *self-assessment* untuk pengusaha kecil dan menengah menunjukkan persepsi positif. Kesimpulan berikutnya tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pajak penghasilan antara pengusaha kecil dan menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiatmanto (1999) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sesudah reformasi pajak tahun 1983 lebih baik dibandingkan dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, jika berdasarkan pada jumlah rupiah pajak terhimpun. Sementara berdasarkan jumlah wajib pajak yang terjaring, kepatuhan wajib pajak sesudah reformasi perpajakan tahun 1983 tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983.

Suhardito (1996) menguji apakah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak, wajib pajak wiraswasta, dan wajib pajak nir-wiraswasta berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota Surabaya.

Varosi, *et al.* (2000) menguji apakah pengetahuan tentang situasi penggelapan pajak mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak. Hasil penelitian mereka mengindikasikan terdapat perubahan perilaku pembayar pajak ketika seorang penghindar pajak terlihat tidak bertanggung jawab secara sosial atau moral. Terjadi penurunan kecenderungan untuk menghindari pajak ketika partisipan memiliki pengetahuan tentang situasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh penghindar pajak.

Hutama (2010) menguji pengaruh pengetahuan informasi penggelapan pajak dan prinsip moral pada kecenderungan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan informasi penggelapan pajak dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak dengan prinsip moral yang tinggi memiliki kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah daripada wajib pajak dengan prinsip moral yang rendah.

Hutama (2010) tidak membedakan wajib pajak berdasarkan penghasilan. Dari hasil survei Kompas 13 Juni 2008 (Kompas.com) menunjukkan bahwa lebih banyak orang berpenghasilan rendah yang membayar PPh dibanding orang kaya. Meskipun penelitian Utama (2010) berhasil mengidentifikasi bahwa pengetahuan informasi penggelapan pajak dan prinsip moral berpengaruh pada kecenderungan penghindaran pajak, namun tidak membedakan antara wajib pajak yang masuk kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Oleh sebab itu, penulis ingin menguji pengaruh pengetahuan informasi penggelapan pajak, prinsip moral, dan penghasilan pada kecenderungan penghindaran pajak karena diduga ada perbedaan kecenderungan penghindaran pajak berdasarkan prinsip moral dan penghasilan.

Penelitian ini ingin menguji apakah terdapat pengaruh informasi penggelapan pajak dan prinsip moral terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Perlu diteliti pengaruh informasi penggelapan pajak terhadap kecenderungan penghindaran pajak karena pengetahuan dari seseorang mengenai situasi penghindaran pajak yang menonjol akan mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Varosi, *et al.* (2000). Kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak menurun ketika individu tersebut memiliki pengetahuan tentang penggelapan pajak.

Varosi, *et al.* menguji apakah pengetahuan tentang situasi penggelapan pajak mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak. Hasil penelitian mereka mengindikasikan terdapat perubahan perilaku pembayar pajak ketika seorang penghindar pajak terlihat tidak bertanggung jawab secara sosial atau moral. Terjadi penurunan kecenderungan untuk menghindari pajak ketika partisipan memiliki pengetahuan tentang situasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh penghindar pajak.

Hutama (2010) menguji pengaruh pengetahuan informasi penggelapan pajak dan prinsip moral pada kecenderungan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan informasi penggelapan pajak dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari

pajak. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak dengan prinsip moral yang tinggi memiliki kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah daripada wajib pajak dengan prinsip moral yang rendah.

Penelitian yang dilakukan Utama ini tidak membedakan partisipan penelitian menjadi partisipan yang berpenghasilan tinggi dan partisipan yang berpenghasilan rendah. Bagaimana kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh seseorang yang berpenghasilan tinggi jika dibandingkan dengan seseorang yang berpenghasilan rendah menjadi pertanyaan berikutnya. Oleh sebab itu, penelitian ini memperluas penelitian yang dilakukan oleh Utama (2010) dengan menambahkan variabel penghasilan.

Pengaruh prinsip moral terhadap kecenderungan penghindaran pajak perlu diteliti karena menurut Kaplan dan Reckers (1985), karakter moral dari seorang penghindar pajak dipengaruhi oleh tujuan untuk menghindari pajak. Seseorang akan menghindari pajak jika orang lain yang memiliki moral tinggi, misalnya warga negara yang baik atau pengusaha yang jujur, melakukan penghindaran pajak. Seseorang akan mengurangi perilakunya untuk menghindari pajak jika melihat kondisi dari orang lain yang menghindari pajak tidak menguntungkan. Hal ini juga didukung dengan teori perbandingan sosial yang menyatakan bahwa seseorang akan memutuskan untuk memperbaiki tindakannya berdasarkan pada informasi dan perilaku orang lain (Jones dan Gerard dalam Varosi, *et al.*, 2000).

Dari data yang diperoleh di harian Kompas 13 Juni 2008 (Kompas.com) menunjukkan bahwa sebanyak 67.000 orang yang membayar PPh hingga Rp 50 juta per tahun, sebanyak 18.000 orang yang membayar PPh antara Rp 201 juta-Rp 300 juta per tahun, sebanyak 13.100 orang yang membayar PPh antara Rp 301 juta-Rp 500 juta per tahun, sebanyak 8.243 orang yang membayar PPh antara Rp 501 juta-Rp 1 miliar, dan sebanyak 3.276 orang yang membayar PPh antara Rp 1 miliar-Rp 2 miliar. Survei tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak orang berpenghasilan rendah yang membayar PPh dibanding orang kaya.

Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah dengan adanya pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak akan menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah? Lalu apakah wajib pajak dengan prinsip moral yang tinggi memiliki kecenderungan yang rendah untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah?

Tujuan penelitian ini adalah menentukan apakah pengetahuan tentang situasi penggelapan pajak yang dipublikasikan dengan baik, prinsip moral, dan penghasilan wajib pajak mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk melalaikan pajak penghasilannya. Pemahaman mengenai pengaruh informasi penggelapan pajak dan prinsip moral terhadap kecenderungan penghindaran pajak maka diharapkan membantu akademisi mendapatkan referensi tambahan dalam membantu pembuat kebijakan publik (pemerintah) dalam membuat kebijakan publik yang dapat mengurangi kasus-kasus penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan dipahaminya isu penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan, diharapkan untuk tidak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak yang dapat merugikan negara dan termotivasi untuk membayar pajak dalam jumlah yang benar guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

### **Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Ketidakpatuhan wajib pajak, seperti yang disebutkan oleh Jackson dan Jaouen (1989) (dalam Varosi, *et al.*, 2000) merupakan masalah yang semakin meluas, baik besarnya maupun efek distribusinya pada wajib pajak. Kehilangan pendapatan dari sektor pajak merupakan bidang perhatian dari aparat pajak, dan ketidakpatuhan secara serius mempengaruhi integritas sistem pajak *self-assessment*. Temuan penelitian Spicer (1974) (dalam Varosi, *et al.*, 2000) menemukan bahwa ketika pelalaian pajak menjadi meluas, wajib pajak yang jujur akan kehilangan kepercayaan

terhadap sistem pajak yang ada dan menjadi orang yang tidak patuh pajak lagi.

Menurut Coleman (1987) (dalam Varosi, *et al.*, 2000), berkembangnya ketidakpatuhan pajak merupakan fungsi respon otoritas pajak yang terbatas atas persepsi ketidakpatuhan. Penelitian Coleman tersebut menyatakan bahwa kesuksesan eksperimen yang dilakukan oleh *Minnesota Department of Revenue* difokuskan pada wajib pajak yang patuh sebagai sebuah norma dan wajib pajak yang tidak patuh merupakan sebagian kecil dari wajib pajak. Bukti awal ini mengindikasikan bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif atas kelompok wajib pajak secara keseluruhan dalam eksperimen.

Teori keadilan dan teori perbandingan sosial berusaha menjelaskan ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun kedua teori ini bertolak belakang, namun keduanya memberikan dasar teori untuk menjelaskan ketidakpatuhan wajib pajak. Berikut penjelasan mengenai kedua teori tersebut.

### **Teori Keadilan**

Spicer dan Lundstedt (1976) (dalam Varosi, *et al.*, 2000) dan Spicer dan Becker (1980) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara keadilan dan kepatuhan. Wajib pajak cenderung mematuhi hukum pajak jika merasa bahwa hukum pajak tersebut adil. Spicer dan Lundstedt (1976) (dalam Varosi, *et al.*, 2000) menemukan indikasi korelasi antara sikap dan perilaku dalam persepsi ketidakadilan yang tampak memotivasi beberapa wajib pajak untuk melalaikan pajak. Secara lebih spesifik, beberapa wajib pajak mungkin melalaikan pajak sehingga mereka dapat menyesuaikan kesepakatan perdagangannya dengan pemerintah dalam merespon ketidakpuasan yang berasal dari ketidakadilan yang dirasakannya.

Penelitian McCrohan dan Sugrue (1998) mendesain penelitian yang mengidentifikasi profil sosioekonomik konsumen yang bertransaksi dengan pemasok (*supplier*) informal. McCrohan dan Sugrue meneliti pembelian rumah tangga dari pemasok informal yang menyediakan barang dan jasa untuk pasar sektor legal, untuk mencari kelemahan dari percobaan audit pajak, dengan tujuan untuk menghindari pajak. McCrohan dan

Sugrue menemukan bahwa konsumen yang menggunakan pemasok informal adalah konsumen yang memiliki tingkat sosioekonomik dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Menurut penelitian tersebut, pembelian rumah tangga dengan tingkat sosioekonomik yang lebih tinggi mencari kelemahan dari percobaan audit pajak, dengan tujuan untuk menghindari pajak. Hal ini dirasakan tidak adil oleh konsumen dengan tingkat sosioekonomik lebih rendah. Penelitian McCrohan dan Sugrue ini juga didukung oleh penelitian yang didukung oleh penelitian Song dan Yarbrough (1978), yang menyatakan bahwa wajib pajak merasa tidak percaya dengan sistem pajak dimana mereka mencurigai yang kaya umumnya melarikan diri dari kewajiban pajak melalui celah hukum yang ada.

### Teori Perbandingan Sosial

Teori keadilan seperti yang telah dinyatakan oleh Spicer dan Lundstedt (1976) (dalam Varosi, *et al.*, 2000) dan Spicer dan Becker (1980), menyatakan bahwa persepsi ketidakadilan wajib pajak adalah motivasi bagi wajib pajak untuk melalaikan pajak. Wajib pajak cenderung mematuhi hukum pajak jika merasa bahwa hukum pajak tersebut adil. Sebaliknya, berlawanan dengan teori keadilan, teori perbandingan sosial menyatakan bahwa ketika dihadapkan dengan ketidakadilan yang tampak di depan mata, wajib pajak bisa saja tidak memilih melalaikan pajak jika mereka memandang pihak lain secara sosial atau moral tidak bertanggung jawab (Varosi, *et al.*, 2000). Dalam hal ini, teori perbandingan sosial berfungsi sebagai penyeimbang (*counter balance*). Menurut teori perbandingan sosial, seseorang akan memutuskan untuk memperbaiki tindakannya berdasarkan pada informasi dan perilaku orang lain (Jones dan Gerard dalam Varosi, *et al.*, 2000). Selanjutnya, jika pihak lain tidak sejalan dengan kemampuan dan pendapat seseorang maka individu tersebut kurang tertarik pada situasi yang melibatkan orang lain tersebut (Slusher & Griffin dalam Varosi, *et al.*, 2000).

Kaplan & Reckers (1985) menemukan bahwa karakter moral dari orang yang melalaikan pajak mempengaruhi niat seseorang untuk melalaikan pajak. Seseorang akan menghindari pajak jika

orang lain yang memiliki moral tinggi, misalnya warga negara yang baik atau pengusaha yang jujur, melakukan penghindaran pajak. Seseorang akan mengurangi perilakunya untuk menghindari pajak jika melihat kondisi dari orang lain yang menghindari pajak tidak menguntungkan.

### Prinsip Moral

Forsyth (dalam Yetmar dan Eastman, 2000) menyarankan bahwa perbedaan individual dalam pendekatan terhadap pertimbangan moral didasarkan pada dua faktor prinsip moral yakni idealisme dan relativisme. Idealisme adalah tingkat di mana individu berkaitan dengan kesejahteraan bagi yang lain. Individu yang idealismenya tinggi merasakan mengganggu orang lain selalu dapat dihindarkan. Seorang yang idealis tidak akan memilih perilaku negatif yang dapat mengganggu orang lain. Hal yang sebaliknya terjadi jika nilai-nilai idealismenya rendah.

Sebaliknya, relativisme adalah penolakan aturan moral yang absolut dalam memandu perilaku. Individu yang relativismenya tinggi mengadopsi falsafah moral pribadi yang didasarkan pada skeptis. Mereka umumnya merasa bahwa tindakan moral tergantung pada sifat dan individu yang terlibat. Ketika menilai sesuatu, mereka menekankan aspek keadaan daripada prinsip etika yang dilanggar. Orang yang memiliki relativisme rendah berargumen bahwa moralitas memerlukan tindakan yang konsisten dengan prinsip moral, norma, dan hukum.

Konsep idealisme dan relativisme bukanlah hal yang berlawanan. Seorang relativis dapat juga sekaligus memiliki idealisme yang tinggi atau yang rendah. Prinsip moral (pada penelitian lain menyebutkan orientasi etika) yang diyakini individu terbukti mempunyai hubungan yang positif dengan keputusan perilaku etis (Husein, 2003). Ziegenfuss & Singhapakdi (1994) dan Yetmar & Eastman (2000) menguji dua bentuk dari prinsip moral yakni idealisme dan relativisme. Idealisme dan relativisme tidak berpengaruh pada perilaku etis. Pada penelitian Yetmar dan Eastman disebutkan bahwa relativisme berhubungan negatif dengan perilaku etis. Kedua peneliti menggunakan dua bentuk prinsip moral yang berasal dari Forsyth

(dalam Yetmar dan Eastman, 2000). Walaupun hasil penelitian ini satu sama lain bertolak belakang, namun penelitian yang dilakukan oleh Husein (2003) dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara prinsip moral yang diyakini individu dengan keputusan perilaku etis.

Yetmar dan Eastman (2000) juga menyatakan bahwa pengujian prinsip moral relativisme mengarah pada kategorisasi orientasi etika individual. Prinsip moral idealisme menunjukkan hasil pengujian yang tidak signifikan. Jika tingkat relativisme individual meningkat, individu tersebut cenderung untuk menolak peraturan moral yang absolut dalam berperilaku dan merasa bahwa tindakan moral individual tergantung pada situasi dan kondisi yang dialami individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tingkat relativisme yang lebih tinggi menghalangi kemampuan individual untuk mengakui isu-isu etis. Mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Yetmar dan Eastman tersebut, penelitian ini menambahkan variabel *personal values* yang ditinjau dari prinsip moral relativisme. Penulis tidak mengukur prinsip moral idealisme karena menurut Yetmar dan Eastman (2000), penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengukuran prinsip moral idealisme menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

### **Penghasilan Wajib Pajak**

Dugaan bahwa wajib pajak berpenghasilan tinggi (orang kaya) membayar pajak dengan jumlah lebih sedikit sudah dibuktikan oleh teori keadilan. Penelitian McCrohan dan Sugrue yang juga didukung oleh penelitian yang didukung oleh Song dan Yarbrough (1978), yang menyatakan bahwa wajib pajak merasa tidak percaya dengan sistem pajak dimana mereka mencurigai yang kaya umumnya melarikan diri dari kewajiban pajak melalui celah hukum yang ada.

Sebaliknya, berlawanan dengan teori keadilan, teori perbandingan sosial menyatakan bahwa ketika dihadapkan dengan ketidakadilan yang tampak di depan mata, wajib pajak bisa saja tidak memilih melalaikan pajak jika mereka memandang pihak lain secara sosial atau moral tidak bertanggung jawab (Varosi, *et al.*, 2000). Dalam hal ini, teori perbandingan sosial berfungsi

sebagai penyeimbang (*counter balance*). Menurut teori perbandingan sosial, seseorang akan memutuskan untuk memperbaiki tindakannya berdasarkan pada informasi dan perilaku orang lain (Jones dan Gerard dalam Varosi, *et al.*, 2000).

Ditinjau dari prinsip moral (*personal values*) dan dengan membedakan penghasilan wajib pajak ke dalam dua kelompok yang berbeda, penelitian ini memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dengan dugaan bahwa ada perbedaan kecenderungan penghindaran pajak pada kedua kelompok yang berprinsip moral tinggi dan rendah, serta pada kedua kelompok yang berpenghasilan tinggi dan rendah.

### **Perumusan Hipotesis**

Ketika ditanyakan mengapa sistem pajak tidak adil, wajib pajak langsung menyebutkan individu yang kaya dan perusahaan besar hanya membayar pajak yang sangat kecil (Hite dalam Varosi, *et al.*, 2000). Publisitas media tentang perusahaan besar yang melaporkan secara signifikan laba tapi tidak membayar pajak mendorong persepsi ini terjadi. Persepsi ketidakadilan mungkin mengarahkan beberapa wajib pajak untuk melalaikan pajak. Hal ini sesuai dengan teori keadilan yang menyatakan bahwa situasi penghindaran pajak yang menonjol akan menghasilkan kecenderungan untuk tidak patuh terhadap pajak.

Varosi, *et al.* (2000) menyatakan bahwa pengetahuan dari seseorang mengenai situasi penghindaran pajak yang dipublikasikan dengan baik akan mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak. Lebih spesifik lagi, Varosi, *et al.* menyatakan bahwa kecenderungan seseorang untuk menghindari pajak menurun ketika individu tersebut memiliki pengetahuan tentang penggelapan pajak. Hasil dari penelitian Varosi, *et al.* ini sesuai dengan teori perbandingan sosial, yang menjadi teori penyeimbang (*counter balance*) dari teori keadilan. Teori perbandingan sosial menyatakan bahwa situasi penghindaran pajak yang menonjol mungkin atau tidak mungkin menghasilkan kecenderungan dalam berperilaku tidak patuh terhadap pajak.

Walaupun teori keadilan dan teori perbandingan sosial bertolak belakang, namun

penelitian ini menduga bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak akan mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah sehingga hipotesis alternatif pertama dari penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>:** Pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Di samping itu, untuk memperkuat temuan penelitian Varosi, *et al.*, penelitian ini ingin menguji apakah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak selain dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak juga dipengaruhi oleh prinsip moral yang dianutnya. Hal ini berdasarkan pada penelitian Kaplan dan Reckers (1985) yang menyatakan bahwa karakter moral dari seorang penghindar pajak dipengaruhi oleh tujuan untuk menghindari pajak. Seseorang akan menghindari pajak jika orang lain yang dinilai memiliki moral tinggi, misalnya warga negara yang baik atau pengusaha yang jujur, melakukan penghindaran pajak. Seseorang akan mengurangi perilakunya untuk menghindari pajak jika melihat kondisi dari orang lain yang menghindari pajak tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, penelitian ini menduga bahwa prinsip moral mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Dengan demikian, hipotesis alternatif ke-2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>:** Wajib Pajak dengan prinsip moral yang tinggi memiliki kecenderungan yang rendah untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

## 2. METODA PENELITIAN

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak, prinsip moral, dan penghasilan wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Kasus mengenai informasi penggelapan pajak berfungsi sebagai *treatment* dalam penelitian eksperimental ini.

### Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Informasi Penggelapan Pajak

Pengukuran terhadap variabel pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak dilakukan dengan cara memberikan *treatment* yang berupa kasus penggelapan pajak. Pemberian *treatment* tersebut akan dapat memisahkan atau membedakan partisipan yang tidak mengetahui informasi tentang penggelapan pajak dan partisipan yang mengetahui informasi tentang penggelapan pajak. Diharapkan terdapat perbedaan kecenderungan untuk menghindari pajak antara wajib pajak yang sebelumnya memiliki informasi tentang penggelapan pajak dan wajib pajak yang tidak memiliki informasi tentang penggelapan pajak.

### Kecenderungan Penghindaran Pajak

Pengukuran terhadap variabel kecenderungan penghindaran pajak dilakukan dengan cara menggunakan *Tax Resistance Scale* yang dikembangkan oleh Spicer dan Lundstedt (dalam Varosi, *et al.*, 2000). Varosi, *et al.* (2000) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak dapat diobservasi secara langsung dalam lingkungan yang dikendalikan (penelitian eksperimental) sehingga *Spicer's Tax Resistance Scale* (1974) berfungsi sebagai surogasi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pajak. *Spicer's Tax Resistance Scale* terdiri dari 15 pertanyaan dengan lima kategori respon dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju) yang mengukur kecenderungan relatif responden untuk menghindari pajak. *Tax Resistance Scale* mempunyai nilai berkisar dari 15 (yang mengindikasikan kepatuhan yang tinggi dan kecenderungan yang rendah untuk melalaikan

pajak) hingga 75 (menunjukkan kepatuhan yang rendah dan kecenderungan yang tinggi untuk melalaikan pajak).

### **Prinsip Moral**

Prinsip moral adalah keyakinan dalam menggunakan nilai-nilai moral dalam pembuatan keputusan secara absolut (Forsyth dalam Yetmar & Eastman, 2000). Partisipan penelitian eksperimental ini diberikan pertanyaan tentang kecenderungan prinsip moral yang diyakininya. Prinsip moral (pada penelitian lain menyebutkan orientasi etika) yang diyakini individu terbukti mempunyai hubungan yang positif dengan keputusan perilaku etis (Husein, 2003). Penelitian ini menambahkan variabel *personal values* yang ditinjau dari prinsip moral relativisme.

Forsyth dalam Ziegenfuss & Singhapakdi (1994) menggunakan 20 pertanyaan yang disebut *Ethic Position Questionnaire* (EPQ) yang mengukur prinsip moral idealisme (10 pertanyaan) dan prinsip moral relativisme (10 pertanyaan). Penulis tidak mengukur prinsip moral idealisme karena menurut Yetmar dan Eastman (2000), penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengukuran prinsip moral idealisme menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Kuesioner prinsip moral relativisme ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan lima kategori respon dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju) yang mengukur tinggi atau rendahnya prinsip moral yang dianut seseorang. Skala kuesioner prinsip moral nilainya berkisar dari 10 (yang mengindikasikan moral yang tinggi) hingga 50 (menunjukkan moral yang rendah).

### **Penghasilan Wajib Pajak**

Penghasilan wajib pajak akan dibagi menjadi dua kelompok, pertama wajib pajak dengan penghasilan tinggi dan wajib pajak dengan penghasilan rendah. Data ini diperoleh dari data demografi partisipan dengan menjamin kerahasiaan partisipan. Pengelompokan data ke dalam kedua kelompok tersebut menggunakan median. Median adalah nilai tengah dari suatu distribusi. Median digunakan untuk mengukur data *interval-ratio* dan berfungsi untuk menghindari *extreme-score*

pada saat distribusi data tidak normal (Cooper dan Schindler, 2001). Jika *score* berada di bawah median maka data termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah sedangkan jika berada di atas median maka data termasuk kelompok berpenghasilan tinggi.

### **Subjek Eksperimen**

Eksperimental ini dilakukan dengan menggunakan subjek mahasiswa S1 dan S2, manajer keuangan, dan pelaku bisnis (pengusaha). Subjek mahasiswa S1 adalah mahasiswa program akhir pekan (*Week-End Class*) semester akhir yang hampir semuanya telah bekerja dan penghasilannya dipotong pajak penghasilan. Demikian juga dengan subjek mahasiswa S2, yang diharapkan telah bekerja dan penghasilannya dipotong pajak penghasilan. Dengan demikian, subjek mahasiswa S1 dan S2 ini dapat mewakili partisipan yang digolongkan sebagai wajib pajak.

Varosi, *et al.* (2000) mengungkapkan bahwa penelitian tentang kepatuhan pajak (*tax compliance research*) sering menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Untuk mengatasi pertanyaan apakah latar belakang pengalaman pajak partisipan mahasiswa dianggap representatif sebagai surogasi dari pembayar pajak, Varosi, *et al.* menggunakan cara mengumpulkan karakteristik demografi dan latar belakang pajak yang memenuhi relevansi pembayar pajak.

Penulis juga melakukan langkah yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Varosi, *et al.* dengan memasukkan karakteristik pembayar pajak dalam mengumpulkan data demografi partisipan, seperti data penghasilan per bulan/tahun partisipan, status kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak penghasilan, dan pernah atau tidaknya partisipan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

### **Desain Eksperimental**

#### **Desain Matriks**

Penelitian ini membagi partisipan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama (grup kontrol) adalah kelompok yang tidak diberi *treatment*, yang dianggap sebelumnya tidak memiliki informasi tentang penggelapan pajak. Sedangkan kelompok

kedua (grup *treatment*) adalah kelompok yang diberi *treatment*, yang dianggap telah memiliki informasi tentang penggelapan pajak. Pada dasarnya, penelitian eksperimental digunakan dalam konteks menguji hubungan sebab akibat antara satu variabel independen dan satu variabel dependen.

Sedangkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih manipulasi pada variabel dependen dalam waktu yang bersamaan dapat digunakan desain faktorial (Sekaran, 1992). Untuk lebih jelasnya maka Tabel 2-1 di bawah ini akan menggambarkan desain penelitian eksperimental 2x3.

Tabel 2.1 Desain Eksperimen 2X3

	Kecenderungan Penghindaran Pajak	Prinsip Moral		Penghasilan Wajib Pajak	
		Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
Pengetahuan tentang Informasi Penggelapan Pajak	Tahu	$X_1Y_1$	$X_2Y_1$	$X_3Y_1$	$X_4Y_1$
	Tidak Tahu	$X_1Y_2$	$X_2Y_2$	$X_3Y_2$	$X_4Y_2$

**Tugas**

Karena partisipan terbagi menjadi dua kelompok, maka kuesioner yang disampaikan kepada partisipan juga terdiri dari dua jenis kuesioner. Penulis sengaja mengganti nama kuesioner untuk grup kontrol menjadi kuesioner grup 1 (satu). Demikian pula untuk kuesioner grup *treatment* menjadi kuesioner grup 2 (dua). Penggantian nama kuesioner bertujuan supaya partisipan tidak mengetahui apakah mereka digolongkan ke dalam grup kontrol atau grup *treatment*, sehingga dapat menghindari terjadinya bias dalam pengisian kuesioner.

Partisipan dibagi ke dalam dua grup secara random, yaitu grup kontrol (grup 1) dan grup *treatment* (grup 2). Urutan tugas yang diberikan kepada dua kelompok tersebut berbeda karena sebelum mengisi *Spicer's Tax Resistance Scale*, grup *treatment* (grup 2) terlebih dahulu membaca kasus penggelapan restitusi pajak. Sedangkan grup kontrol (grup 1) langsung mengisi mengisi

*Spicer's Tax Resistance Scale* baru kemudian membaca kasus penggelapan restitusi pajak. Diharapkan terdapat perbedaan kecenderungan untuk menghindari pajak antara wajib pajak yang sebelumnya memiliki informasi tentang penggelapan pajak (grup *treatment*/grup 2) dan wajib pajak yang tidak memiliki informasi tentang penggelapan pajak (grup kontrol/grup 1). Berdasarkan kelompok, urutan-urutan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap partisipan Grup 1 (kontrol) adalah:

1. Mengisi data demografi
2. Menjawab *Tax Resistance Scale*
3. Membaca kasus penggelapan pajak
4. *Manipulation Check*, dan
5. Menjawab kuesioner prinsip moral.

Sedangkan untuk Grup 2 (*treatment*) adalah:

1. Mengisi data demografi
2. Membaca kasus penggelapan pajak
3. Menjawab *Tax Resistance Scale*

4. *Manipulation Check*, dan
5. Menjawab kuesioner prinsip moral.

### Analisis

#### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA)  $>0,5$  sehingga *confirmatory factor analysis* dapat dilakukan. Selain itu, nilai *eigenvalue* harus  $>1$  dan masing-masing butir pertanyaan dari setiap variabel diharapkan memiliki *factor loadings*  $\geq 0,40$  serta hanya menjadi anggota satu faktor (Hair, *et al.*, 1998).

Sedangkan pada uji reliabilitas, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $>0,60$  (Nunnally dalam Ghozali, 2005). Semakin tinggi nilai *Cronbach's Alpha* semakin tinggi reliabilitas sebuah kuesioner.

#### **Manipulation Check (Uji Manipulasi)**

Mengacu pada penelitian Varosi, *et al.* (2000), penulis mendesain pertanyaan yang diberikan kepada partisipan pada tahap *manipulation check* untuk memeriksa seberapa jauh konsep penghindaran pajak dipahami oleh partisipan. *Mean score* digunakan untuk mendeteksi tingkat pemahaman partisipan terhadap konsep penghindaran pajak.

#### **Pengujian Hipotesis**

Pengaruh pengetahuan tentang informasi penggelapan pajak dan prinsip moral wajib pajak terhadap kecenderungan penghindaran pajak dianalisis menggunakan ANOVA (*Analysis of Variance*). Pada penelitian ini, digunakan analisis *Three Way ANOVA* karena menguji pengaruh tiga variabel independen kategorikal terhadap variabel dependen. Tiga variabel independen kategorikal dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang informasi penggelapan pajak (tahu atau tidak tahu),

prinsip moral (tinggi atau rendah), dan penghasilan wajib pajak (tinggi atau rendah). Sedangkan variabel dependennya adalah kecenderungan penghindaran pajak.

Pada *analysis of variance*, variabel independen kategorikal disebut dengan faktor dan jumlah kategori untuk masing-masing variabel independen disebut level (Ghozali, 2005). Variabel pengetahuan tentang informasi penggelapan pajak memiliki dua kategori, yaitu tahu dan tidak tahu. Variabel prinsip moral juga memiliki dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Sedangkan variabel penghasilan wajib pajak juga memiliki dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Studi yang meneliti pengaruh dua atau lebih faktor sering disebut dengan *factorial design*. Penelitian ini meneliti pengaruh tiga faktor dengan membandingkan dua level pengetahuan tentang informasi penggelapan pajak, dua level prinsip moral, dan dua level penghasilan wajib pajak. Oleh sebab itu, pengujian pengaruh tiga faktor (pengetahuan tentang informasi penggelapan pajak, prinsip moral, dan penghasilan wajib pajak) terhadap variabel dependen (kecenderungan penghindaran pajak) menggunakan pengujian *Three Way ANOVA*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Partisipan Eksperimen**

Kriteria partisipan adalah partisipan yang sudah bekerja atau kuliah sambil bekerja dengan tingkat penghasilan yang sudah pernah dipotong pajak penghasilan. Pemilihan partisipan mahasiswa S1 dan S2 yang dipilih adalah kelas karyawan. Diharapkan dari partisipan mahasiswa S1 tersebut sebagian besar mahasiswanya sudah bekerja dengan tingkat penghasilan yang sudah pernah dipotong pajak penghasilan.

Untuk partisipan pelaku bisnis (pengusaha) diambil dari beberapa pemilik perusahaan yang sudah berbentuk perseroan terbatas (PT) sehingga jelas mempunyai NPWP dan sudah melakukan pembayaran pajak penghasilan secara teratur. Sedangkan untuk partisipan manajer keuangan, diharapkan mempunyai penghasilan yang memadai sehingga penghasilannya pernah dipotong pajak penghasilan dan juga sudah mengurus

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) di perusahaan tempatnya bekerja.

Dalam melaksanakan eksperimen, partisipan selalu dibagi menjadi 2 kelompok (grup) secara random. Grup 1 adalah kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberi *treatment* (tidak tahu informasi penggelapan pajak) sedangkan grup 2

adalah kelompok *treatment*, yaitu kelompok yang diberi *treatment* berupa kasus penggelapan pajak (tahu informasi penggelapan pajak).

Jumlah partisipan dan pembagian ke dalam grup 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 3-1 di bawah ini.

**Tabel 3.1** Jumlah Partisipan, Pembagian Grup, dan Waktu Pelaksanaan Eksperimen

NO.	PARTISIPAN	JUMLAH PARTISIPAN	
		GRUP	
1.	Dosen Tetap STIE SBI	Grup 1	5
		Grup 2	5
2.	Mahasiswa S1 STIE SBI	Grup 1	6
		Grup 2	6
3.	Mahasiswa S2 Prog. M.Si. Akuntansi UGM Sem 1	Grup 1	8
		Grup 2	7
4.	Mahasiswa S2 Prog. M.Si. Akuntansi UGM Sem 3	Grup 1	3
		Grup 2	4
5.	Mahasiswa PPAk STIE YKPN Angkatan 7	Grup 1	6
		Grup 2	7
6.	Mahasiswa PPAk STIE YKPN Angkatan 8	Grup 1	9
		Grup 2	8
7.	Pelaku Bisnis (Pemilik 4 Perseroan Terbatas) di Yogyakarta	Grup 1	6
		Grup 2	6
8.	Manajer Keuangan 6 Perseroan Terbatas di Yogyakarta	Grup 1	3
		Grup 2	3
9.	Mahasiswa S2 Program MM UGM Kelas Eksekutif Angkatan 9A	Grup 1	13
		Grup 2	12
10.	Mahasiswa S2 Program MM UGM Kelas Eksekutif Angkatan 9B	Grup 1	12
		Grup 2	13

### Profil Partisipan

Dari 142 partisipan yang mengikuti eksperimental laboratorium ini, partisipan laki-laki berjumlah 76 orang (53,52%) dan partisipan perempuan berjumlah 66 orang (46,48%). Partisipan yang berumur 20 s.d. 22 tahun berjumlah 8 orang (5,63%), umur 23 s.d. 25 tahun berjumlah 48 orang (33,80%), umur 26 s.d. 30 tahun berjumlah 39 orang (27,46%), umur 31 s.d. 35 tahun berjumlah 23 orang (16,20%), umur 36 s.d. 40 tahun berjumlah 13 orang (9,15%), umur 41 s.d. 45 tahun sebanyak 3 orang (2,11%), umur 46 s.d. 50 tahun berjumlah 3 orang (2,11%), dan partisipan yang berumur lebih dari 50 tahun mencapai jumlah 5 orang (3,52%)

Sebanyak 46,48% atau 66 orang partisipan telah menikah dan 53,52% atau 76 orang partisipan

belum menikah. Partisipan dengan jumlah penghasilan per bulan berjumlah dibawah 1 juta rupiah sebanyak 22 orang (15,49%). Partisipan berpenghasilan antara 1 juta rupiah s.d. 1,5 juta rupiah sebanyak 38 orang (26,76%). Partisipan dengan penghasilan antara 1,5 juta rupiah s.d. 2 juta rupiah sebanyak 18 orang (12,68%). Partisipan dengan penghasilan antara 2 juta rupiah s.d. 3 juta rupiah sebanyak 23 orang (16,20%) dan partisipan dengan penghasilan antara 3 juta rupiah s.d. 5 juta rupiah berjumlah 17 orang (11,97%). Sedangkan partisipan yang mempunyai penghasilan di atas 5 juta rupiah per bulannya mencapai 24 orang (16,90%).

Partisipan dikelompokkan berdasarkan penghasilan dengan kriteria jika gaji di atas 5 juta

rupiah maka dikelompokkan sebagai partisipan berpenghasilan tinggi sedangkan jika gaji kurang dari sama dengan 5 juta maka dikelompokkan sebagai partisipan berpenghasilan rendah. Tabel 3.2 menunjukkan jumlah sampel untuk masing-masing variabel.

**Tabel 3.2** Jumlah Sampel

<b>Between-Subjects Factors</b>			
		Value Label	N
INF	1	Tidak Tahu	71
	2	Tahu	71
PM	1	Tinggi	74
	2	Rendah	68
PHSL	1	Tinggi	32
	2	Rendah	110

**Statistik Deskriptif**

Tabel 3.3 di bawah ini memperlihatkan distribusi mean kecenderungan penghindaran pajak (KC) pada tiga variabel independen (INF,

PM, dan PHSL). Tabel ini dapat digunakan untuk merumuskan kecenderungan tinggi rendahnya penghindaran pajak dalam model penelitian ini (desain eksperimen 2x3).

**Tabel 3.3** Distribusi Mean Kecenderungan Penghindaran Pajak pada Tiga Variabel Independen

<b>Descriptive Statistics</b>					
Dependent Variable: KC					
INF	PM	PHSL	Mean	Std. Deviation	N
Tidak Tahu	Tinggi	Tinggi	27,17	5,557	12
		Rendah	27,95	7,032	21
		Total	27,67	6,455	33
	Rendah	Tinggi	34,33	1,155	3
		Rendah	30,71	4,184	35
		Total	31,00	4,139	38
	Total	Tinggi	28,60	5,767	15
		Rendah	29,68	5,534	56
		Total	29,45	5,560	71
Tahu	Tinggi	Tinggi	23,77	5,747	13
		Rendah	23,86	4,301	28
		Total	23,83	4,732	41
	Rendah	Tinggi	35,25	4,500	4
		Rendah	26,04	4,322	26
		Total	27,27	5,324	30
	Total	Tinggi	26,47	7,332	17
		Rendah	24,91	4,410	54
		Total	25,28	5,240	71
Total	Tinggi	Tinggi	25,40	5,802	25
		Rendah	25,61	5,933	49
		Total	25,54	5,850	74
	Rendah	Tinggi	34,86	3,288	7
		Rendah	28,72	4,810	61
		Total	29,35	5,022	68
	Total	Tinggi	27,47	6,628	32
		Rendah	27,34	5,536	110
		Total	27,37	5,775	142

**Pengujian Hipotesis**

Pengaruh pengetahuan tentang informasi penggelapan pajak dan prinsip moral wajib pajak terhadap kecenderungan penghindaran pajak dianalisis dengan menggunakan *Three Way ANOVA*. Sebelumnya dilakukan uji asumsi

yang harus dipenuhi, yaitu varians dari populasi adalah sama (Santoso, 2001). Asumsi tersebut diuji dengan menggunakan *Levene's Test*. Hasil pengujian *Levene's Test* dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4** Levene's Test

**Levene's Test of Equality of Error Variances<sup>a</sup>**

Dependent Variable:KC

F	df1	df2	Sig.
2,066	7	134	,051

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + INF + PM + PHSL + INF \* PM + INF \* PHSL + PM \* PHSL + INF \* PM \* PHSL

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa signifikansi >0,05 (0,051). Kondisi ini menunjukkan bahwa varians dari kelompok-kelompok yang diteliti adalah secara statistis sama sehingga asumsi ANOVA dipenuhi.

Setelah uji asumsi ANOVA terpenuhi, dilakukan uji *Three Way ANOVA* dengan menggunakan *General Linear Model* untuk menguji hipotesis. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 3-5.

**Tabel 3.5** Hasil Uji Three Way ANOVA

**Tests of Between-Subjects Effects**

Dependent Variable:KC

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1353,081 <sup>a</sup>	7	193,297	7,732	,000
Intercept	58703,484	1	58703,484	2348,226	,000
INF	141,622	1	141,622	5,665	,019
PM	622,535	1	622,535	24,902	,000
PHSL	159,928	1	159,928	6,397	,013
INF * PM	15,593	1	15,593	,624	,431
INF * PHSL	44,261	1	44,261	1,771	,186
PM * PHSL	210,084	1	210,084	8,404	,004
INF * PM * PHSL	26,800	1	26,800	1,072	,302
Error	3349,876	134	24,999		
Total	111048,000	142			
Corrected Total	4702,958	141			

a. R Squared = ,288 (Adjusted R Squared = ,250)

Dari hasil pengujian *Three Way ANOVA* (Tabel3-5) menunjukkan bahwa signifikansi informasi penggelapan pajak (INF) <0,05 (0,019), artinya informasi penggelapan pajak (INF) berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KC). Signifikansi prinsip moral (PM) <0,05 (0,000), artinya prinsip moral (PM) berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KC). Selain itu, signifikansi penghasilan (PHSL) <0,05 (0,013), artinya penghasilan (PHSL) berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak (KC) Hasil interaksi antara INF dan PHSL memiliki

signifikansi >0,05 (0,186), artinya tidak terdapat pengaruh bersama atau *joint effect* antara informasi penggelapan pajak dan penghasilan. Kemudian, hasil signifikansi antara PM dan PHSL memiliki signifikansi <0,05 (0,004), artinya terdapat pengaruh bersama atau *joint effect* antara prinsip moral dan penghasilan.

Signifikansi perbedaan kecenderungan penghindaran pajak (KC) antara kelompok yang “tahu” dan “tidak tahu” informasi penggelapan pajak, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini.

**Tabel 3.6** Perbedaan Mean KC antara Partisipan “Tahu” dan “Tidak Tahu” Informasi Berdasarkan Penghasilan

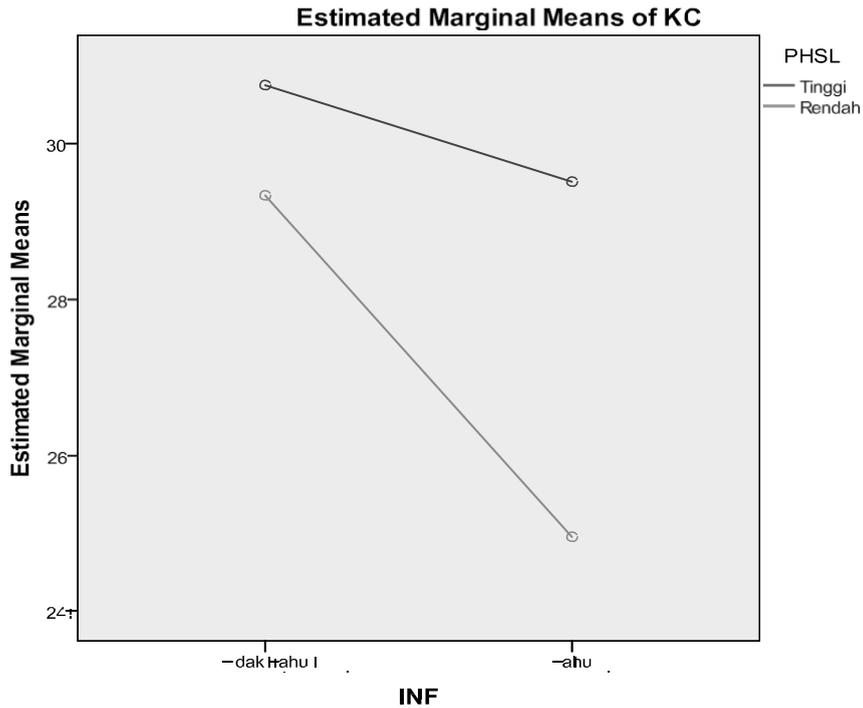
**1. INF \* PHSL**

Dependent Variable: KC

INF	PHSL	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound
Tidak Tahu	Tinggi	30,750	1,614	27,558	33,942
	Rendah	29,333	,690	27,969	30,698
Tahu	Tinggi	29,510	1,429	26,683	32,337
	Rendah	24,948	,681	23,601	26,294

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa mean kecenderungan penghindaran pajak (KC) untuk kelompok yang tidak tahu informasi penggelapan pajak dan berpenghasilan tinggi lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tahu informasi penggelapan pajak dan berpenghasilan tinggi (30,750>29,510). Selain itu, mean kecenderungan penghindaran pajak (KC) untuk kelompok yang

tidak tahu informasi penggelapan pajak dan berpenghasilan rendah lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tahu informasi penggelapan pajak dan berpenghasilan rendah (29,333>24,948). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_1$  didukung. Interaksi antara variabel INF dan PHSL dapat dilihat pada Gambar 3-1.



Gambar 3.1 Interaksi INF dan PHSL

Signifikansi perbedaan kecenderungan penghasilan tinggi maupun rendah dapat dilihat penghindaran pajak (KC) antara kelompok yang pada tabel 3-7 berikut ini. berprinsip moral tinggi dan rendah, baik yang

Tabel 3.7 Perbedaan Mean Prinsip Moral Berdasarkan Penghasilan

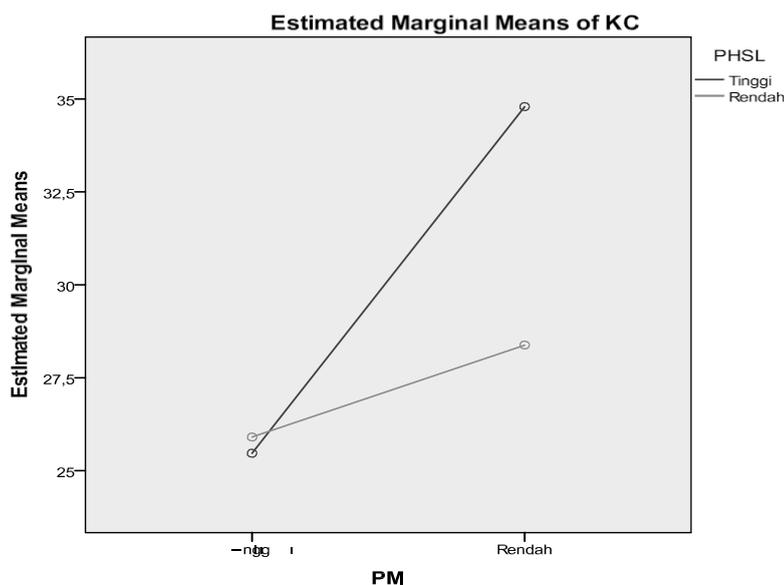
**2. PM \* PHSL**

Dependent Variable: KC

PM	PHSL	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound
Tinggi	Tinggi	25,468	1,001	23,489	27,447
	Rendah	25,905	,722	24,477	27,332
Rendah	Tinggi	34,792	1,909	31,015	38,568
	Rendah	28,376	,647	27,096	29,657

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa mean wajib pajak yang berprinsip moral tinggi dan berpenghasilan tinggi lebih rendah dibandingkan wajib pajak yang berprinsip moral rendah dan berpenghasilan tinggi (25,468 > 34,792). Selain itu, mean wajib pajak yang berprinsip moral tinggi dan berpenghasilan rendah lebih rendah dibandingkan

wajib pajak yang berprinsip moral rendah dan berpenghasilan rendah (25,905 > 28,376). Hal ini menunjukkan bahwa H<sub>2</sub> didukung. Interaksi antara variabel prinsip moral dan penghasilan dapat dilihat pada gambar 3.2.



**Gambar 3.2** Interaksi PM dan PHSL

#### 4. SIMPULAN

1. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak, yaitu informasi penggelapan pajak, prinsip moral, dan penghasilan. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental 2x3 (*Three Way ANOVA*).
2. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap informasi penggelapan pajak dapat menurunkan kecenderungan untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.
3. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa wajib pajak dengan prinsip moral yang tinggi memiliki kecenderungan yang rendah untuk menghindari pajak, baik pada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.
4. Sebagai penutup, penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan seperti mengapa wajib pajak patuh dan bukan fokus pada mengapa wajib pajak tidak patuh terhadap pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiatmanto, Agus. 1999. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983 (Studi pada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler. 2001. *Business Research Methods*. Seventh Edition, Irwin/McGraw-Hill Companies. Inc., New York.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, Joseph F., et al. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Heru, Rudy Gunarso. 1997. *Peran Perencanaan Pajak untuk Menghasilkan Penghematan Pajak (Studi Kasus Industri Sepatu PT. ISR)*. Tesis. Program S2 MBA Technology Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Husein, M. F. 2003. *Keterkaitan Faktor-Faktor Organisasional, Individual, Konflik Peran, Perilaku Etis dan Kepuasan Kerja Akuntan*

- Manajemen*. Tesis. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hutama, Ponty Sya'banto Putra. 2010. The Influence of the Awareness of the Information on Tax Evasion and Moral Principle towards the Propensity of Tax Evasion: an Experimental Study. *The Indonesian Journal of Accounting Research (JRAI)*, Vol. 13 No. 1 (January): 59-76.
- Kaplan, Steven E. dan Philip M. J. Reckers. 1985. A Study Of Tax Evasion Judgements. *National Tax Journal* Vol. 38 No. 1: 97-102.
- Kompas*, 14 Januari 2006, Praktik Ekspor Fiktif Sudah Berlangsung Puluhan Tahun.
- Kompas*, 15 Januari 2006, Ekspor Fiktif Meluas.
- Kompas*, 28 Januari 2006, Menelikung Pajak.
- Kompas*, 13 Juli 2006, Perpajakan Semakin Digenjot.
- Kreitner, R., dan A. Kinicki. 2001. *Organizational Behavior*. McGraw Hill, New York.
- Mayangsari, Sekar. 2003. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasiekperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI)*, Vol. 6 No. 1 (Januari): 1-22.
- McCrohan, Kevin F. dan Timothy F. Sugrue. 1998. An Empirical Analysis Of Informal Market Participation. *Sosial Science Quarterly* Vol. 79 No. 1 (March): 212-226.
- Priono, Hero. 2002. *Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment (Studi Terhadap Pengusaha Kecil dan Menengah di Surabaya)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. Second Edition, John Wiley & Son Inc., Canada.
- Siegel, Joel G. dan Jae K. Shim. 1994. *Kamus Istilah Akuntansi*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Versi 10, Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Song, Young-dahl dan Tinsley E. Yarbrough. 1978. Tax Ethics And Taxpayer Attitudes: A Survey. *Public Administration Review* 38 (September/October): 442-460.
- Spicer, Michael W. dan Lee A. Becker. 1980. Fiscal Inequity And Tax Evasion: An Experimental Approach. *National Tax Journal* Vol. 33 No. 2: 171-175.
- Suhardito, Bambang. 1996. *Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Uppal, J. S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia. *Economic Review Journal* No. 201 (September).
- Varosi, Terry R., Bonnie K. Klamm, dan Kevin F. McCrohan. 2000. The Effect Of A Salient Tax Avoidance Situation On Propensity To Evade Income Taxes. *Research On Accounting Ethics* Vol. 7: 65-81.
- www.asiamaya.com. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Asas Undang-Undang No. 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umum.
- Yetmar, Scott A. dan Kenneth K. Eastman. 2000. Tax Practitioners' Ethical Sensitivity: A Model and Empirical Examination. *Journal of Business Ethics* Vol. 26: 271-288.
- Ziegenfuss, Douglas E. dan Anusorn Singhapakdi. 1994. Professional Values and The Ethical Perceptions of Internal Auditors. *Managerial Auditing Journal* Vol. 9: 34-44.

## LAMPIRAN 1

TAX RESISTANCE SCALE  
Spicer (1974)

Seberapa setujukah setiap pernyataan berikut ini sesuai dengan perasaan, pengalaman, dan perilaku Bapak/Ibu.

1=Sangat Tidak Setuju; 2=Tidak Setuju; 3=Netral; 4=Setuju; 5=Sangat Setuju

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1. Dengan adanya beban pajak, tidak seorang pun dapat menyalahkan pelalai pajak.	1	2	3	4	5
2. Dengan adanya kesempatan untuk melalaikan pajak, seseorang tidak dapat menyalahkan pelalai pajak.	1	2	3	4	5
3. Jika saya ragu untuk melaporkan sumber penghasilan tertentu, saya tidak akan melaporkannya.	1	2	3	4	5
4. Karena pemerintah memperoleh pajak yang cukup, tidak menjadi masalah jika ada yang melalaikan pajaknya.	1	2	3	4	5
5. Pajak begitu berat sehingga pelalaian pajak merupakan kebutuhan ekonomis bagi banyak orang untuk dapat bertahan.	1	2	3	4	5
6. Jika saya menerima uang atas jasa yang sebenarnya menjadi objek pajak, saya tidak akan melaporkannya.	1	2	3	4	5
7. Penipuan tentang pajak dapat dibenarkan sejalan dengan ketidakadilan yang ada pada sistem pajak	1	2	3	4	5
8. Saya tidak akan pernah peduli dengan pengurangan pajak saya.	1	2	3	4	5
9. Pajak adalah sesuatu yang direbut dari penghasilan saya.	1	2	3	4	5
10. Karena setiap orang melalaikan pajak, maka seseorang tidak dapat disalahkan ketika melakukan pelanggaran pajak.	1	2	3	4	5
11. Saya tidak akan pernah melalaikan pajak.	1	2	3	4	5
12. Pada saat waktu membayar pajak tiba, saya akan berusaha bertanya kepada kantor pajak apa yang harus saya lakukan.	1	2	3	4	5
13. Tidaklah merupakan suatu hal yang buruk ketika penghasilan kena pajak dilaporkan rendah.	1	2	3	4	5
14. Jika seseorang melaporkan penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, maka orang tersebut mempunyai keberanian lebih untuk melakukannya.	1	2	3	4	5
15. Saya tidak akan merasa cemas sama sekali jika saya tidak melaporkan semua penghasilan saya ke kantor pajak.	1	2	3	4	5

LAMPIRAN 2

ETHIC POSITION QUESTIONNAIRE (RELATIVISM)  
Forsyth (1980)

Seberapa setujukah pernyataan berikut ini sesuai dengan perasaan, pengalaman, dan perilaku Bapak/Ibu.

1=Sangat Tidak Setuju; 2=Tidak Setuju; 3=Netral; 4=Setuju; 5=Sangat Setuju

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1. Prinsip-prinsip etika tidak terlalu penting untuk menjadi bagian dari setiap kode etik.	1	2	3	4	5
2. Setiap situasi dan masyarakat yang berbeda memiliki definisi etika yang berbeda pula.	1	2	3	4	5
3. Standar moral seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang bersifat pribadi; apa yang dianggap bermoral oleh seseorang bisa jadi bagi orang lain tidak bermoral.	1	2	3	4	5
4. Berbagai jenis moralitas tidak dapat dibandingkan dengan apa yang disebut dengan kebenaran.	1	2	3	4	5
5. Pertanyaan tentang apakah sesuatu hal itu etis bagi setiap orang tidak akan pernah dapat diatasi karena moral dan tidak bermoral tergantung pada individu.	1	2	3	4	5
6. Standar moral adalah aturan pribadi yang sederhana yang menunjukkan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dan tidak digunakan untuk menilai orang lain.	1	2	3	4	5
7. Pertimbangan etis dalam hubungan antar pribadi begitu rumit sehingga individu seharusnya diijinkan untuk merumuskan kode etiknya sendiri.	1	2	3	4	5
8. Berpegang teguh pada etika yang mencegah tindakan tertentu dapat mengganggu hubungan antar manusia dan penyesuaian yang lebih baik.	1	2	3	4	5
9. Aturan tentang kebohongan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dirumuskan, apakah suatu kebohongan diijinkan atau tidak sangat tergantung pada situasi.	1	2	3	4	5
10. Apakah suatu kebohongan dianggap bermoral atau tidak bermoral tergantung pada keadaan yang melingkupi kejadian tersebut.	1	2	3	4	5